

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAREFA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 852312

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.980.000.000**

1. Tanah Seluas 448 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 226 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 260.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 28.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. ---****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 4.268.500.000****III. HUTANG****Rp. 5.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 4.263.500.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADEK IMELDA SYAM
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 851770

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/160 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, WARISAN Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60.000 m2/120 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ---

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.060.000.000

III. HUTANG Rp. 367.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.693.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANFEBRIANITA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHH : 514862

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	808.000.000
III. HUTANG	Rp.	187.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	621.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIADY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 870694

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m²/130 m² di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 325.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. LAINNYA, POLYGON EXTRADA 6 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. LAINNYA, POLYGON CELIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
7. MOTOR, YAMAHA MIO Z Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
8. LAINNYA, POLYGON PREMIER 5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
9. LAINNYA, POLYGON PREMIER 5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 241.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	98.431.665
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.464.431.665
III. HUTANG	Rp.	400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.064.431.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.